

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
MEDAN-INDONESIA

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi Sarjana Akuntansi Program Strata Satu (S1) dari mahasiswa:

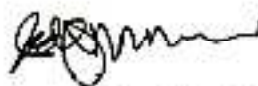
Nama : Leisa Situmorang
NPM : 20510021
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Sistem Pengendalian Intern Penyaluran Kredit Pada PT. Bank Sumut

Telah diterima dan terdaftar pada Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Medan. Dengan diterimanya Skripsi ini, maka telah dilengkapi syarat-syarat akademik untuk menempuh Ujian Skripsi guna menyelesaikan studi.

Sarjana Akuntansi Program Studi Strata Satu (S1)

Program Studi Akuntansi

Pembimbing Utama



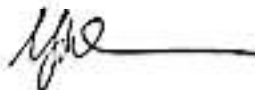
(Dr. Jadongan Sijabat, S.E., M.Si)
NIDN : 0112087402

Dekan



(Dr. E. Hamonangan Sallagan S.E., M.Si)
NIDN : 0126047902

Pembimbing Pendamping



(Dr. Magdalena J. Siringoringo, S.E., M.Si)
NIDN : 0115068506

Ketua Program Studi



(Dr. E. Maratap Berliana Lumban Gaol, S.E., M.Si., Ak, CA)
NIDN : 0127018102

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Ekonomi yang stabil dapat membantu memperlancar upaya pemerintah dan memberikan perencanaan pembangunan ekonomi bagi masyarakat, keadaan ekonomi yang stabil akan memudahkan pemerintah untuk menilai rencana pembangunan ekonomi. Bank mempunyai kewenangan untuk menghimpun atau menyalurkan dana namun mereka juga harus berkontribusi peningkatan pendapatan dan kesenjangan sosial serta berfungsi sebagai wadah kegiatan ekonomi masyarakat.

Masalah yang dihadapi masyarakat ialah masalah pembiayaan dan permodalan, serta bagaimana menggunakan fasilitas untuk mewujudkan tujuan. Dalam hal ini bank berperan dalam membantu masalah yang dihadapi oleh individu tersebut melalui penyaluran kredit dan membantu permodalan ke individu yang mempunyai penghasilan tetap dalam memberikan kredit, sehingga individu tersebut dapat membantu masalah permodalan dan meningkatkan kualitas hidup sehingga mereka dapat membantu pertumbuhan ekonomi.

Sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dan penyalur dana ke masyarakat dengan cara memberikan pinjaman pada masyarakat salah satunya adalah kredit. Pinjaman yang diberikan Bank dalam bentuk kredit tersebut berasal dari dana masyarakat maka memiliki resiko yang tinggi yaitu tidak kembalinya kredit itu tepat pada waktunya yang dinamakan *Non Performing Loan* (NPL).

Dimana tingkat kesehatan bank salah satunya diukur dari tingkat rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) atau biasa dikenal sebagai “Rasio NPL” yang akibatnya dapat mengganggu likuiditas bank. Semakin banyak bank penyalurkan kredit maka akan memiliki kemungkinan *Non Performing Loan* (NPL) yang mana merupakan persentase kredit bermasalah (dengan kriteria kurang lancar, diragukan dan macet terhadap total kredit yang disalurkan). NPL ini dapat juga diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan hal ini tentu saja akan mempengaruhi pertumbuhan modal bank. Selain besarnya beban operasional dan meningkatnya NPL yang dapat mempengaruhi jumlah modal, terdapat faktor lain yang mempengaruhi jumlah modal yaitu pembagian deviden yang tidak seimbang dengan laba yang ditahan karena modal bersih bank mencerminkan jumlah dana yang akan disalurkan kembali kepada masyarakat.

Bank menyediakan beberapa fasilitas kredit, salah satu bentuk persetujuan kredit yang diberikan adalah modal kerja. Kredit modal kerja merupakan kredit jangka pendek dengan sistem berulang (*revolving*) diberikan oleh bank kepada pelaku bisnis (debitur) untuk memenuhi kebutuhan modal kerjanya. Kredit modal kerja ditunjukkan sebagai tambahan maupun cadangan modal kerja usaha calon debitur, bila modal kerja tersebut tidak tercukupi. Kebutuhan modal kerja terjadi dikarenakan untuk perluasan usaha untuk perluasan usaha kebidang usaha lain, banyak order dari *customer* yang mengakibatkan modal sendiri tidak cukup untuk membiayai perputaran usahanya. Dengan kata lain modal kerja dibutuhkan untuk melancarkan, mempertahankan, dan meningkatkan kegiatan produksinya sebagai upaya dalam mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Maka dengan itu

pelaku bisnis tertuntut untuk menggunakan fasilitas kredit modal kerja yang ditawarkan oleh pihak bank dan salah satunya adalah PT. Bank sumut medan.

PT. Bank sumut adalah bank milik pemerintah yang telah menyalurkan berbagai jenis kredit sekaligus menjadi bank andalan dalam membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan di segala bidang. Pemberian kredit membutuhkan suatu sistem yang nantinya digunakan untuk menjalankan kredit, sistem tersebut dapat dijadikan pedoman bagi nasabah dalam pengajuan kredit terlebih dahulu dilakukan analisis terhadap nasabah oleh pihak bank dengan menggunakan analisis 5C meliputi penilain terhadap watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*), dan kondisi ekonomi (*condition*). Selain itu juga memperhatikan prinsip kehati-hatian sehingga tidak menimbulkan terjadinya tunggakan kredit atau kredit macet.

Agar suatu perusahaan dapat mencapai tujuan yang lebih jelas pengendalian intern sangat diperlukan. Untuk berfungsi sebagai bisnis yang kuat dan independen, mereka harus mampu meningkatkan efesiensi pemberian kredit dan berusaha sebaik mungkin untuk mengurangi kegagalan kredit.

Sistem pengendalian intern merupakan salah satu hal yang penting dalam penyaluran kedit. Menurut Fibriyanti dkk.,(2018) **“Sistem Pengendaian Intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang di koordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian, keandalan data akuntansi, mendorong efesiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen”**. Definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang

terkoordinasi dan ditetapkan dalam perusahaan untuk melindungi kekayaan organisasi seperti menjaga kerahasiaan data akuntansi, meningkatkan efisiensi, menjaga aktiva perusahaan dan meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen dan tujuan yang hendak dicapai. Sistem pengendalian intern akan membantu untuk menghindari tingginya jumlah piutang yang tak tertagih atau disebut juga dengan kredit macet. Selain itu sistem pengendalian intern dalam penyaluran kredit tidak hanya tergantung dari sedikit banyaknya tahapan yang dilalui calon debitur tapi bagaimana tahapan tersebut dilaksanakan dengan baik dan benar sebelum dana disalurkan kepada calon debitur. Sebelum dana tersebut disalurkan, pihak bank perlu memastikan *history* atau riwayat calon debitur terhadap kredit atau pembiayaan pada lembaga perbankan lainnya. Dalam tahapan pemberian kredit, pihak bank harus memastikan berkas-berkas dan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak bank sudah terpenuhi. Jika pemberian kredit dilakukan dengan benar, pihak perbankan akan lebih mudah memberikan kredit kepada calon debitur, jika terjadi sesuatu yang salah selama proses pemberian kredit, hal itu dapat menyebabkan kredit macet.

Bank harus benar-benar memperhatikan sistem pengendalian intern dalam pemberian fasilitas kredit sehingga resiko akan adanya kredit yang bermasalah dapat di perkecil. Kredit yang bermasalah ini dapat mengganggu kelancaran usaha bank yang tentunya dapat menimbulkan krisis kepercayaan dari masyarakat. Dengan terselenggaranya sistem pengendalian intern yang memadai, terutama dalam bidang perkreditan berarti menunjukkan sikap kehati-hatian bank dalam

menjaga kepercayaan diri masyarakat dan dalam menjaga kelangsungan hidup usahanya.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahas bagaimana pengendalian intern diterapkan dalam penyaluran kredit pada PT. Bank Sumut dan akan membahasnya dalam tugas akhir penulis dengan judul: **“ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS PENYALURAN KREDIT PADA PT. BANK SUMUT MEDAN”**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sistem pengendalian intern penyaluran kredit yang diterapkan di PT. Bank SUMUT Medan?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pengendalian intern atas penyaluran kredit pada PT. Bank SUMUT Medan.

Ruang Lingkup/Batasann Penelitian

Penelitian ini dibatasi agar pembahasan dalam penelitian ini lebih ter arah dan tidak meluas serta tidak menyimpang dari tujuannya.

1.1 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini, yaitu :

1. Bagi Penulis

Untuk menambahkan wawasan bagi penulis dalam hal mengetahui sejauh mana pengendalian intern terhadap penyaluran kredit disetiap perusahaan.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau masukan bagi perusahaan yang berkaitan dengan pengendalian intern atas penyaluran kredit.

3. Bagi Peneliti Lainnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai refrensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian dalam khusus yang sama.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Bank merupakan suatu usaha bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalulintas pembayaran dan peredaran uang.

Menurut, Rikayanti, (2021) diartikan sebagai berikut:

“Bank merupakan lembaga keuangan yang menawarkan jasa keuangan seperti kredit, tabungan, pembayaran jasa dan melakukan fungsi-fungsi keuangan lainnya secara profesional”

Menurut, Purwatiasih dkk., (2014) UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan: **“Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak”**.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat yang berlebihan dana (*surplus unit*) dalam bentuk simpanan dalam menyalurkannya pada masyarakat yang kekurangan dana (*deficil unit*) dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa lainnya.

2.1.2 Fungsi Bank

Fungsi utama dari bank ialah memberikan himpunan dana serta penyaluran dana dari masyarakat untuk masyarakat dengan tujuan pembiayaan.

Menurut (Yunawati, 2019) , beliau mengemukakan fungsi bank sebagai berikut :

- 1. Sebagai penghimpun dana**
- 2. Sebagai penyalur dana**
- 3. Sebagai pelayanan jasa**

1. Sebagai penghimpun dana

dapat diartikan sebagai penerimaan dana dari masyarakat luas untuk disimpan di bank. Bank akan membayar dengan jumlah tertentu atas penghimpunan dana masyarakat yang besar himpunannya tergantung pada jenis simpan.

2. Sebagai penyalur dana

Dana yang telah dikumpulkan bank akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit, pembelian surat-surat berharga, dan pemilikan harta tetap dengan adanya jaminan berdasarkan syarat yang ditetapkan pihak bank guna untuk pembiayaan usaha nasabah atau pinjaman. Kredit yang diberikan tergantung pada kemampuan pihak bank.

3. Sebagai pelayanan jasa

Pelayanan jasa ialah aktivita pendukung yang dilakukan oleh pihak bank dalam melancarkan usaha nasabah untuk melakukan transaksi dibank.

2.1.3 Jenis-jenis bank

Jenis-jenis bank menurut: Hamonangan Siallagan, (2021)

1. Diliat dari Fungsinya

Menurut undang undang perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan undang undang RI Nomor 10 Tahun 1998 maka jenis perbankan terdiri dari:

a. Bank Umum

Adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti tidak memberikan seluruh jasa perbankan diseluruh wilayah.

b. Bank Pengkreditan Rakyat

Bank pengkreditan rakyat (BPR) ialah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibanding dengan kegiatan bank umum.

c. Bank Sentral

Bank sentral pada umumnya adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab akan kebijakan moneter diwilayah negara tersebut. Fungsi dan peran bank sentral berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan.

2. Diliat dari segi kepemilikannya

a. Bank Campuran

Adalah jenis bank yang kepemilikan sahamnya bercampur antara pihak asing dan pihak swasta nasional. Saham bank ini sebagian besar dimiliki oleh warga negara Indonesia, namun sebagian dimiliki pihak lain.

b. Bank Asing

Merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah negara asing. Kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar secara utuh.

c. Bank Milik Pemerintah

Bank sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia.

d. Bank swasta Nasional

Bank dimana sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta, pembagian keuntungan juga untuk swasta nasional.

e. Bank Koperasi

Jenis bank yang kepemilikannya sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Bank ini menerapkan asas-asas dan prinsip koperasi pada umumnya

3. Jenis Bank Menurut Kegiatan Operasinya

1. Bank Konvensional

Ialah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan temuan yang telah ditetapkan. Pada umumnya bank ini beroperasi dengan mengeluarkan produk-produk untuk menyerap dana masyarakat, menyalurkan dana yang telah di himpun dengan cara mengeluarkan kredit, pelayanan jasa keuangan dan jasa-jasa lainnya.

2. Bank Syariah

Jenis perbankan yang kelembagaannya, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya dilakukan dilakukan secara syariah.

4. Jenis Bank Berdasarkan Bentuk Badan Usaha

Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu meminta izin usaha sebagai bank umum atau bank pengkreditan rakyat dari pemimpin bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan penghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang sendiri.

5. Jenis Bank Menurut Target Pasar

Sebagian bank memfokuskan pelayanan dan transaksinya pada jenis bank nasabah tertentu. Secara umum, jenis bank atas dasar target pasarnya dapat digolongkan menjadi tiga :

1. Retail Bank

Fokus pada pelayanan dan transaksi nasabah-nasabah retail baik nasabah-nasabah individual, perusahaan, dan lembaga lain yang skalanya kecil.

2. Corporate Bank

Fokus pada pelayanan dan transaksi kepada nasabah-nasabah yang beskala besar yang biasanya berbentuk kopras. Namun demikian tidak berarti seluruh nasabahnya berbentuk satu perusahaan.

3. Retail-Corporate Bank

Disamping jenis bank diatas, ada juga bank yang tidak memfokuskan keada dua pilihan jenis nasabah diatas. Jenis bank ini membarikan pelayanannya tidak hanya kepada nasabah retail juga kepada nasabah koporasi.

Bank jenis ini memandang bahwa potensi baik pasar ritel dan korporasi harus dimanfaatkan untuk mengoptimalkan keuntungan maksimal, meskipun terdaapat kemungkinan penurunan efesiensi.

2.2 Kredit

2.2.1 Pengertian Kredit

Pengertian kredit menurut undang-undang perbankan No.10 tahun 1998, Rosna dkk., (2022) adalah

“ Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan atau persetujuan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain dengan mewajibkan pihak peminjam untuk

melunasi hutang sesuai dengan jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Dalam pengertian kredit di atas merupakan kredit merupakan penyaluran dana dari pemilik dana kepada pihak yang memerlukan dana. Dalam bahasa latin berasal dari kata “*credere*” yang berarti percaya. Maka pihak yang memberikan kredit bahwa pihak yang menerima kredit pasti akan membayar kembali dengan ketentuan yang ditetapkan bank. Kredit

2.2.2 Unsur-Unsur Kredit

Adapun unsur-unsur pemberian kredit menurut Endah Masrunik, (2017a) sebagai berikut:

a. Kepercayaan.

Kepercayaan yaitu suatu keyakinan bagi kreditur bahwa yang diberikan kepada pihak penerima kreditur akan mengembalikan atau akan diterima kembali sesuai jangka waktu yang ditetapkan.

b. Kesepakatan

Adapun unsur kesepakatan ialah mengandung kesepakatan antara kreditur dengan kreditur. Kesepakatan ini di tuangkan didalam perjanjian dan ditandatangani oleh pihak hak dan kewajibannya.

c. Tenggang Waktu

Setiap kredit yang ditetapkan memiliki jangka waktu tertentu untuk mengembalikan kredit yang telah disepakati. Dan jangka waktu tersebut bisa jangka waktu pendek (dibawah satu tahun), jangka waktu menengah (satu sampai tiga tahun) dan jangka waktu panjang (diatas tiga tahun)

d. Resiko

Akibat adanya jangka waktu yang diberikan maka Semakin panjang jangka waktu yang diberikan oleh pihak bank maka semakin besar resiko yang diterima oleh pihak kreditur, maka pengembalian kredit akan memungkinkan terjadinya resiko tidak tertagih atau disebut kredit macet.

e. Timbal Balik

Balas jasa bagi pihak bank yaitu keuntungan yang diberikan suatu kredit atau jasa disebut juga dengan nama bunga. Selain bunga pihak bank juga memberatkan biaya administrasi kredit yang dapat menguntungkan pihak bank.

2.2.3. Jenis-Jenis Kredit

Jenis jenis kredit secara umum dibedakan sesuai dengan bentuk kredit, jangka waktu dan tujuan penggunaan kredit menurut : Wahyuni, (2021)

Jenis Kredit Menurut Bentuknya

a. Kredit Rekening Koran

Kredit yang secara langsung akan dimasukkan ke rekening giro nasabah. Debitur diberi hak atas penarikan dana dari rekening giro kapan saja sebatas plafon yang diberikan. Kredit rekening koran tergolong dalam kredit jangka pendek (paling lama satu tahun)

b. Installment Loan

Installment loan merupakan kredit dengan angsuran teratur yang dilakukan sesuai dengan jadwal angsuran yang telah dilakukan sesuai dengan jadwal angsuran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit.

Jumlah angsuran selama masa kredit, kecuali bila dalam perjanjian kredit ditentukan bunga mengambang, yaitu tingkat suku bunga sesuai dengan ketentuan bunga dipasar. Dalam *installment loan* angsuran merupakan penjumlahan antara pembayaran angsuran pokok ditambah dan bunga.

1. Jenis kredit menurut jangka waktunya

a. Kredit jangka pendek

Kredit jangka pendek adalah kredit yang diberikan kurang dari satu tahun. Biasanya kredit jangka pendek diberikan untuk modal dan kredit rekening koran.

b. Kredit jangka menengah

Kredit jangka menengah antara satu sampai tiga tahun. Kredit ini biasanya diberikan kepada investasi yang nilai kreditnya tidak terlalu besar.

c. Kredit jangka panjang

Kredit jangka panjang diberikan oleh pihak bank lebih dari jangka waktu 3 tahun. Kredit ini umumnya diberikan pada KPR dan kredit investasi.

2. Jenis Kredit Menurut Penggunaannya

a. Kredit Investasi

Kredit investasi merupakan kredit yang diberikan dengan tujuan untuk menggandakan barang-barang modal atau dalam rangka investasi perusahaan.

b. Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja diberikan oleh bank dalam rangka pemberian kebutuhan modal kerja perusahaan. Modal kerja perusahaan dapat berupa kebutuhan operasional kebutuhan antara lain kebutuhan dana untuk menutupi piutang-piutang perusahaan, kebutuhan dana untuk menutup penggunaan dana dalam proses pertumbuhan produk barang atau jasa.

- c. Kredit konsumsi merupakan kredit yang diberikan dengan tujuan untuk pembelian barang-barang konsumen yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan pribadi

2.2.4 Analisis Kredit

Sebelum kredit diputuskan, perlu di analisis terlebih dahulu kelayakan kredit tersebut. Tujuannya untuk menghindari kredit yang di biayain nantinya tidak layak' kalau ini terjadi, kemungkinan besar bank akan menerita kerugian karena ketidak mampuan nasabah untuuk mengembalikan pinjaman macet.

Beberapa alat analisis yang dapat digunakan untuk menemukan kelayakan suatu kredit, yaitu menurut Rangan dkk.,(2021)

Dengan Lima (5) yaitu:

- a. *Character*, ialah suatu keyakinan yang mampu melihat sifat dan watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini dapat dilihat dari latar belakang si nasabah aik dari latar belakang pekerjaan maupun sifat pribadi.

- b. *Capacity*, ialah untuk melihat nasabah dalam bidang jenis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diatur dengan kemampuan dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah, begitu juga kemampuan dalam menjalankan usaha ini, pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam melunasi kredit yang disalurkan.
 - c. *Capital*, untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan dilihat dari pengukuran dari segi *likuiditas*, *solvabilitas*, *rentabilitas*, dan ukuran lainnya. Capital ini dilihat darimana saja sumber modal yang ada sekarang.
 - d. *Collateral*, untuk menjamin keamanan dalam proses peminjaman dan cara pelunsannya maka diperlukan jaminan baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak. Jaminan sangatlah penting untuk penyelesaian kredit, apa bila debitur tidak mampu membayar bunga yang sudah ditetapkan oleh pihak bank.
 - e. *Condition of economic*
Dalam hal penilaian terpenting dalam pemberian kredit untuk melihat kondisi ekonomi dan politik dimasa yang akan datang sesuai dengan sektor masing-masing dan prospek usaha dari sektor yang akan dijalankan.
1. Dengan Konsep Tujuh (7) P
 - a. *Personality* (kepribadian)

Yaitu nilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya dalam sehari-hari maupun masalah.

b. *Purpose* (tujuan)

Yaitu untuk mengetahui tujuan debitur dalam pengambilan kredit.

c. *Party* (kelompok)

Yaitu untuk mengklasifikasikan debitur kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan berdasarkan modal, loyalitas, serta karakter.

d. *Payment* (pembayaran)

Merupakan ukuran bagi mana cara debitur mengembalikan kredit yang telah di ambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.

e. *Prospect* (prospek)

Untuk menilai usaha debitur dimasa yang akan datang, menguntungkan atau tidak.

f. *Profitability* (tingkat keuntungan)

Dilihat dari kemampuan nasabah dalam mencari laba dan melihat usaha yang dijalankan semakin meningkat atau tetap sama atau dapat dipertimbangkan dalam penambahan kredit.

g. *Protection* (perlindungan)

Untuk menjaga agar usaha dan jaminan usaha dapat perlindungan.

2.2.5. Tujuan dan Fungsi Kredit

Adapun tujuan utama dari pemberian kredit menurut yaitu:

1. Mendapat Keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Terutama dari sukubunga yang diterima oleh pihak bank sesuai dengan kesepakatan.

2. Mendukung Usaha Nasabah

Bertujuan untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana baik dari ivenstasi maupun untuk modal kerja. Dengan dana tersebut pihak debitur dapat mengembangkan dan peluas usahanya.

3. Mendukung Pemerintah

Bagi pemerintah makin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik. Semakin banyak kredit berarti semakin banyak pembangunan diberbagai sektor.

Adapun keuntungan yg didapatkan pemerintah yaitu:

- a. Penerimaan pajak dari keuntungan yang diperoleh dari nasabah dan bank
- b. Membuka kesempatan kerja
- c. Meningkatkan jumlah barang dan jasa
- d. Menghemat devisa negara
- e. Meningkatkan devisa negara

Adapun fungsi:

1. Meningkatkan Daya Guna Uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang dengan arti jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna.

Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi bunga untuk menghasilkan barang dan jasa oleh sipenerima kredit.

2. Meningkatkan Predaran dan Lalulintas Uang

Dengan hal ini uang yang diberikan akan disalurkan, akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lain, sehingga satu daerah yang diuntungkan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan menerima tambahan uang dari daerah lainnya.

3. Meningkatkan Peredaran Barang

Kredit juga dapat menambah dan memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Sehingga barang yang beredar bertambah.

4. Alat Stabilitas Ekonomi

Dengan adanya kredit dapat sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan maka bertambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula membantu dan mengeksport barang dari dalam keluar negeri sehingga meningkatkan devisi negara.

5. Meningkatkan Kegairahan Berusaha

Bagi sipenerima kredit tentu dapat menambah modal untuk meningkatkan usaha apalagi dengan modal pas-pasan

6. Meningkatkan Pemerataan Pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan maka semakin baik terutama untuk meningkatkan pendapatan. Seperti jika penerima kredit membuka usaha pabrik maka akan membutuhkan tenaga kerja.

7. Meningkatkan Hubungan Internasional

Dalam hal pinjam internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara sipenerima kredit dengan sipemberi kredit, pemberian kredit dapat meningkatkan kerjasama dibidang lainnya.

2.2.6. Prosedur Pemberian Kredit

Menurut Siti Komaria, dkk, (2015) “ Prosedur pemberian kredit adalah sebelum debitur memperoleh kredit terlebih dahulu harus melalui tahapan-tahapan penelitian mulai dari pengajuan proposal kredit dan dokumen-dokumen yang diperlukan, pemeriksaan keaslian dokumen, analisis kredit sampai dengan kredit di keluarkan”. Prosedur pemberian kredit sebagai berikut:

- a. Mengirin file, pemohon kredit khusus proposal disampaikan. Tambahan file atau tambahan apapun yang diperlukan saat itu,
- b. Penyelidikan ke dalam file pinjaman, pentng untuk memastikan bahwa berkas yang diserahkan akurat dan lengkap sesuai dengan persyaratan jika pemohon kredit ingin proses dengan cepat.
- c. Wawancara satu, ini adalah investigasi terhadap calon peminjam secara langsung
- d. Saat ini, tugas pemeriksa lapangan ini meliputi pemeriksaan sebagai barang yang akan digunakan sebagai jaminan atau untuk tujuan komersial
- e. Pertemuan kedua, merupakan kegiatan perbaikan file setelah selesai dilapangan, file masih bermasalah
- f. Penilaian kredit, keputusan kredit dalam hal ini akan menemukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak. Jika disetujui akan disiapkan oleh pihak

administrasi, jika tidak maka akan dikirimkan surat penolakan serta penjelasan yang sesuai

- g. Penandatanganan kontrak, berfungsi sebagai jaminan yang mengikat secara hukum atas surat perjanjian atau persyaratan penting, harus ditandatangani oleh calon konsumen sebelum kredit diberikan. Penandatanganan akan dilakukan oleh pihak bank dan debitur baik secara langsung maupun notaris.
- h. Realisasi kredit, setelah dokumen yang ditandatangani dan rekening giro atau tabungan dibuka di bank terkait, kredit akan direalisasikan
- i. Pendistribusian atau penarikan dana, pencairan, isebutjuga penyaluran dana dari rekening, atau penarikan, berfungsi sebagai realisasi pemberian kredit dan memungkinkan untuk digunakan sesuai dengan kondisi dan tujuannya.

2.2.7 Kredit Macet

Resiko terjadinya kredit macet dapat disebabkan oleh pihak kreditur (bank) maupun debitur, terjadinya kredit macet kemungkinan karena adanya pengaruh negosiasi dari calon debitur dengan petugas bank agar hasil kredit sesuai keinginan calon debitur, sehingga terkadang pemberian kredit lebih besar dari kebutuhan dan juga kemungkinan masih ada calon debitur yang memberikan keterangan baik-baik saja tentang usahannya.

Kredit macet adalah bagian dari kredit bermasalah. Kredit macet adalah piutang yang tak tertagih atau kredit yang mempunyai kriteria kurang lancar, diragukan karena mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor tertentu.

Faktor-faktor penyebab kredit macet

- a. Berdasarkan prospek usaha
 - 1. Kelangsungan usaha yang diragukan, industri mengalami penurunan dan sulit untuk pulih Kembali
 - 2. Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun
 - 3. Manajemen yang sangat lemah
 - 4. Terjadi kemogokan tenaga kerja yang sangat sulit untuk di Atasi
- b. Berdasarkan keuangan debitur
 - 1. Mengalami keugian yang besar
 - 2. Debitur tidak mau memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan
 - 3. Rasio utang terhadap modal sangat tinggi
 - 4. Pinjaman baru digunakan untuk menutup kerugian oprasional
- c. Berdasarkan kemampuan membayar
 - 1. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan bunga yang telah melampaui 270 hari
 - 2. Dokumentasi kredit atau pengikatan agunan tidak ada

2.3 Sistem Pengendalian Intern

Bank haruslah memiliki struktur pengendalian intern yang memadai dalam pemberian kredit kepada debitur hal ini dilakukan untuk mencegah adanya penyelewengan yang nantinya yang akan melibatkan penurunan *profitabilitas*.

2.3.1 Pengertian pengendalian intern

Bank harus memiliki struktur pengendalian intern yang memadai dalam memberikan kredit pada debitur hal ini dilakukan untuk mencegah adanya penyalahgunaan wewenang yang nantinya akan mengakibatkan penurunan *profitabilitas*

Sistem pengendalian intern menurut Wahyu dkk., (2023) sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang koordinasi untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Dengan diselenggarakan sistem pengendalian yang memadai dalam bidang pengkreditan, berarti menunjukkan sikap kehati-hatian dalam bank tersebut. Sistem pengendalian intern yang efektif dapat membantu pengurus bank menjaga asset bank, jaminan tersediannya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat di percaya, meningkatkan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku, serta mengurangi resiko terjadinya kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran aspek ke hati-hatian. Terselenggaranya sistem pengendalian intern yang baik yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab dari pengurus dan para pejabat bank. Evesiensi sistem pengendalian intern pemberian kredit harus sering dilakukan sehingga apabila ada suatu penyimpangan atau kesalahan dapat segera diketahui.

2.3.2 Tujuan Pengendalian Intern

Dalam mendukung pemberian kredit yang sehat dan penerapan unsur pengendalian intern dalam pengkreditan, bank dituntut melakukan pengawasan

atas tahap proses-proses pemberian kredit yang dilakukannya. Pengawasan kredit merupakan tahap lebih lanjut dari proses pemberian kredit dan merupakan upaya agar kredit yang telah dicairkan tersebut dapat dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang telah dijanjikan.

Tujuan pengendalian intern menurut Efa Wahyu Prastyaningtyas, (2019) adalah sebagai berikut :

1. Mengamankan harta kekayaan perusahaan
2. Mengelola catatan dengan detail yang baik untuk melaporkan aset perusahaan secara akurat dan wajar
3. Memberikan informasi yang akurat dan variabel
4. Mendorong dan memperbaiki efisiensi operasional
5. Mendorong ketaatan terhadap kebijakan manajerial yang telah ditentukan
6. Mematuhi hukum dan ketentuan yang berlaku.

2.3.3 Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern

Untuk menciptakan sistem pengendalian intern yang baik dalam suatu perusahaan maka ada beberapa unsur pokok yang harus dipenuhi :

Menurut, Ampuni, 2023 unsur-unsur yang mendukung pengendalian intern yang baik adalah sebagai berikut:

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Struktur organisasi merupakan kerangka (framework) pembagian tanggung jawab fungsional pada unit-unit organisasi yang melakukan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan.

2. Sistem wewenang dan prosedur yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan utang, pendapatan dan biaya. Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otoritas, dan pejabat yang memiliki wewenang untuk memberikan otoritas tersebut adalah formulir. Oleh karena itu, penggunaan formulir hanya dicatat dalam catatan akuntansi dengan sangat teliti dan dapat diaandalkan untuk proses akuntansi. Selanjutnya, prosedur pencatatan yang baik akan menghasilkan informasi yang diteliti dan dapat dipercaya mengenai kekayaan, utang, pendapatan dan biaya suatu organisasi.
3. Praktik yang efektif dalam menjalankan tanggung jawab dan fungsi setiap organisasi tidak ada cara memastikan pelaksanaan yang sehat dari tanggung jawab dan sistem resmi yang telah ditetapkan. Adapun metode yang bisa digunakan oleh bisnis untuk menerapkan praktik yang sehat adalah:
 - a. Penggunaan formulir bernomor urut cetak yang pemakaiannya harus dipertanggung jawabkan oleh orang yang berwenang.
 - b. Pemeriksaan mendadak (*surprised audit*)
 - c. Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang satu unit organisasi, tanpa ada campur tangan dan orang tau unit organisasi lain
 - d. Perputaran jabatan (*job rotation*).
 - e. Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak.
 - f. Secara priodik diadakan pencatatan fisik kekayaan dengan catatannya.

- g. Unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektifitas unsur-unsur sistem pengendalian intern yang lain.
4. Kartawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawab.

Bagai mana baiknya struktur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, serta berbagai cara yang ditetapkan untuk mendorong praktik yang sehat, semuanya sangat bergantung pada manusia yang melaksanakannya. Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, unsur pengendalian yang lain dapat dikurangi sampai batas yang minimum, dan perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggung jawaban keuangan yang dapat diandalkan

2.4 Sistem pengendalian intern atas penyaluran kredit

2.4.1 Pengertian pengendalian intern penyaluran kredit

Pemberian kredit merupakan salah satu usaha pokok pada suatu lembaga perbankan. Usaha pengkreditan menjadi sumber pendapatan yang utama bagi bank. Sumber pendapatan yang utama ini harus mendapat pengamanan yang memadai serta dapat terhindar dari pengamanan yang memadai serta dapat terhindar dari segala bentuk penyelewengan yang dapat merugikan perusahaan serta menghambat kegiatan bank, dengan diterapkan pengendalian intern yang memadai.

Lestari, Diyah & Topowijono, (2013) pengendalian intern yaitu usaha untuk menjaga kredit yang disalurkan tetap lancar, produktif dan tiak

macet atau kredit itu dapat ditarik kembali bersama bunganya sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui antara kedua belah pihak.

2.4.2 Tujuan pengendalian intern kredit

Dalam mendukung pemberin kredit yang sehat dan penerapan unsur penerapan intern dalam pengkreditan, bank dituntut dalam pengawasan atas tahap proses-proses pemberian kredit yang dilakukan. Pengawasan kredit merupakan tahap lebih lanjut dari proses pemberian kredit dan upaya agar kredit yang dilakukan dicairkan tersebut dapat dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.

Tujuan pengendalian intern bagi lembaga keuangan yaitu:

1. Menjaga agar kredit yang disalurkan tetap aman
2. Mengetahui apakah kredit yang disalurkan ini lancar atau tidak
3. Melakukan tindakan pencegahan dan penyelesaian kredit macet atau kredit bermasalah
4. Mengevaluasi apakah prosedur penyaluran kredit yang dilakukan telah baik atau masih perlu di sempurnakan
5. Memperbaiki kesalahan-kesalahan karyawan analisis kredit dan mengusahakan agar kesalahan itu tidak terulang kembali
6. Mengetahui posisi presentase *collectibility credit* yang dilasurkan lembaga keuangan
7. Meningkatkan moral dan tanggung jawab karyawan analisis kredit lembaga keuangan.

Pengawasan atau pengendalian kredit bertujuan untuk memastikan pengelolaan, penjagaan dan pengawasan kredit sebagai aset atau kekayaan bank telah dilakukan dengan baik timbul resiko-resiko kredit yang diakibatkan penyimpangan baik oleh debitur maupun oleh intern bank.

2.5 Kerangka Berpikir

Sistem pengendalian intern terdiri dari kebijakan dan prosedur spesifik yang dirancang untuk memberikan kepastian wajar bahwa sasaran dan tujuan dari suatu organisasi dapat dipenuhi dan berguna untuk pengambilan keputusan. Menurut Mulyadi “Sistem pengendalian intern meliputi organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang koordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen”. Dalam upaya penyaluran kredit diperlukan sistem pengendalian intern yang baik.

Pihak bank harus memperhatikan aturan kredit yang diberikan pada masyarakat. Aturan yang sudah ditetapkan oleh sistem pengendalian intern PT. Bank SUMUT Medan Sebagai penentu penyaluran kredit. Sebelum memberikan kredit pada nasabah dalam bentuk kredit yang ditentukan, bank harus memastikan bahwa peminjam akan mampu membayar hutang dan bunga yang telah disepakati ini akan mencegah terjadinya kredit macet. Penyimpangan di kemudian hari akan terjadi karena kebijakan dan prosedur pemberian kredit yang tidak diperhatikan. Untuk menentukan apakah kredit yang diajukan oleh calon nasabah dapat diterima atau ditolak, bank harus memeriksa kembali keaslian dokumen yang diberikan ole

pemohon kredit. Primagama dkk., (2018) menjelaskan prosedur pengendalian internal dalam pemberian kredit yang memadai dengan adanya penerapan prinsip 5C dalam proses penyaluran kredit kepada masyarakat sebelum dicairkannya suatu kredit.

Analisis permohonan yang ditetapkan oleh PT. Bank SUMUT Medan dengan menggunakan prinsip 5C berupa penilaian *character* (karakter) untuk menilai karakter dari calon debitur, lama usaha yang dijalankan, gaya hidup, keadaan keluarga, keadaan sosial. *Capacity* (kemampuan) untuk menilai kemampuan bayar dari calon debitur berdasarkan histori BI *checking*. *Capital* (Modal) untuk kemampuan usaha pemohon untuk mendukung pembiayaan dengan modalnya. *Collateral* (jaminan) untuk menilai anggunan/jaminan dari calon debitur dan memiliki jaminan dan nilai yang solid. *Condition of economic* (kondisi ekonomi) untuk melihat kondisi ekonomi dari calon debitur. Sistem pengendalian intern yang digunakan oleh PT. Bank Sumurt Medan menggunakan 5C sebagai penentu pemberian kredit untuk menentukan sejauh mana bank menilai permohonan kredit yang diatur melalui kebijakan dan prosedur kredit dalam penyaluran kredit sehingga dapat ditarik kesimpulan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode Kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek, dimana peneliti adalah instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data yang menggambarkan fakta-fakta atau keadaan serta gejala mengenai Penerapan Sistem Pengendalian Intern Penyaluran Kredit Bank SUMUT Cabang Utama Medan untuk melihat yang sudah diterapkan.

3.2 Lokasi dan Lama Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Bank SUMUT Cabang Utama Medan. Jalan Imam Bonjol No 18, Kota Medan, Sumatra Utara. lama penelitian ini dilakukan selama 3 bulan sesuai dengan berlakunya surat riset pada PT. Bank SUMUT

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambil keputusan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data primer. Data primer yaitu data yang diperoleh penulis melalui pengamatan langsung

3.4 Metode Pengumpulan Data

1. Penelitian perpustakaan (*Library Research*). Penulis mengumpulkan data yang diperlukan dengan cara membaca literatur-literatur, bahan referensi, bahan kuliah, dan hasil penelitian yang relevan dengan kasus yang akan dibahas.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) Data yang dapat diperoleh secara langsung untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, pengumpulan ini dilakukan dengan cara:
 - a. Wawancara, dilakukan dengan bentuk komunikasi variabel atau percakapan yang memberikan pertanyaan untuk memperoleh informasi yang terkait.
 - b. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pencatatan dan penggandaan data sekunder seperti dokumen – dokumen yang ada pada perusahaan seperti, prosedur pemberian kredit, struktur organisasi perusahaan, perkembangan kredit bermasalah dan data lain yang terkait dalam penelitian.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian yang merupakan bagian dari proses pengujian data setelah tahap penelitian dan pengumpulan data penelitian. Metode analisis data yang digunakan peneliti adalah menggunakan:

- a. Metode dekriftif, yaitu dengan mengumpulkan data. Penyusunan dan pengklasifikasi serta mengidentifikasi sehingga memberikan gambaran umum mengenai kebijakan yang dilakukan dalam memecahkan masalah yang dihadapi.